



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir Nomor. 2 ☎ (0532) 21126 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

PERUBAHAN
R E N J A
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 050 / 62 / BANG/ 2017

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
24. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

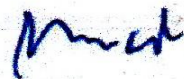
M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2017;
- KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



MASRADIN, SH, MH
NIP. 19620401 198903 1 015

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Kepala BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang mengamanatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan RKPD.

Sehingga dalam rangka memberikan arah yang lebih konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan demi menjamin konsistensi, komitmen dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka disusunlah dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 18 Agustus 2017
Sekretaris Daerah
Kab. Kotawaringin Barat,



MASRADIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620401 198903 1 015

DAFTAR ISI	
	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH	
	12
BAB IVPENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang mengamanatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan Renja.

Sesuai dengan amanat pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan tugas sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. Sesuai amanat pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 peran Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, hal ini menuntut kinerja Sekretariat Daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan

tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan tahun 2017 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun 2017
4. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran tahun 2017

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 perlu dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dalam tahun 2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah ;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika/Susunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dasar pertimbangan perubahan serta sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 (n-1) sampai dengan triwulan II tahun berjalan (tahun 2017).

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2017 memperoleh pagu dana Belanja Langsung sebesar Rp.20.554.739.000,- (Dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 22 Program dan 57 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sampai dengan triwulan II (bulan Juni) tahun 2017 sebesar 36,61 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 28,78 %.

Adapun Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
4. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
5. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
17. Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum

18. Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (RANHAM)
19. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
20. Program Pengembangan Data/ Informasi
21. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah :

1. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemilu
2. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
3. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Kegiatan Pelayanan Ibadah Haji
6. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan
7. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
8. Kegiatan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
9. Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Tenaga Listrik
10. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/ Anggota DPRD
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
17. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor
18. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
19. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
20. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
21. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
22. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

24. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
25. Kegiatan Pembangunan Gedung Knator
26. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
27. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
28. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
29. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
30. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
31. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
32. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
33. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan
34. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
35. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
36. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
37. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
38. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
39. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
40. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
41. Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
42. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
43. Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
44. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
45. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
46. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
47. Publikasi Peraturan Perundang-undangan
48. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
49. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum
50. Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

51. Kegiatan Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
52. Kegiatan Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)
53. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah
54. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
55. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
56. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
57. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga ada beberapa perubahan baik berupa pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif maupun penambahan/ pengurangan target kinerja serta penambahan pagu belanja langsung kegiatan yang semula totalnya sebesar Rp. 20.554.739.000,- menjadi Rp. 27.766.914.000,- atau mengalami penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 7.212.175.000,-.

Adapun program dan kegiatan yang mengalami perubahan dalam perubahan Renja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pemilu : mengalami perubahan pagu dalam kegiatan/ pengurangan belanja perjalanan dinas belanja makanan dan minuman rapat yang dialokasikan/ digeser ke kegiatan lainnya.
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa : perubahan/ penambahan target peserta pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang mengakibatkan penambahan pagu kegiatan.
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan : perubahan target desa yang akan dilakukan evaluasi bidang administrasi desa
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat : pergeseran pagu dan kegiatan dari Dinas Kominfo sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pasal 69 dan 70 tentang tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi, Sub Bagian Peliputan dan Publikasi

4. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

- Pelayanan Ibadah Haji : mengalami perubahan/ penambahan kuota calon jemaah haji, dan perubahan sarana transportasi calon jemaah haji sehingga mengakibatkan penambahan pada pagu kegiatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

- Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik : mengalami penambahan pada output dan pagu kegiatan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : mengalami pengurangan jumlah langganan surat kabar namun mengalami penambahan pada belanja listrik, telepon dan internet.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah : terdapat sisa lebih pelaksanaan kontrak/ sewa asrama mahasiswa, yang kemudian dialokasikan untuk kegiatan lain
- Penyediaan jasa administrasi keuangan : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor : mengalami perubahan output kegiatan
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
- Penyediaan alat tulis kantor : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan/ bergeser ke kegiatan lainnya
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
 - Penyediaan peralatan rumah tangga : penambahan kegiatan baru untuk mengakomodir belanja peralatan rumah tangga yang sebelumnya menjadi catatan dari TAPD pada DPA Setda.
 - Penyediaan makanan dan minuman : mengalami penambahan pagu kegiatan menyesuaikan kebutuhan
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah : mengalami penambahan pagu kegiatan menyesuaikan kebutuhan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan gedung kantor : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan
 - Pengadaan mobil jabatan : penambahan kegiatan baru untuk mengakomodir fasilitas kendaraan/ mobil jabatan untuk Kepala Daerah.
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan.
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor : mengalami penambahan pagu kegiatan menyesuaikan kebutuhan
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah
- Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
 - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri : mengalami

pengurangan output dan pagu kegiatan kemudian dialokasikan untuk kegiatan lainnya

- Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah : mengalami penambahan output dan pagu kegiatan
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya : mengalami penambahan pagu kegiatan menyesuaikan kebutuhan/ undangan/ kegiatan KDH dan Wakil KDH

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan : mengalami pengurangan pagu/ pergeseran anggaran antar kegiatan
- Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah : mengalami penambahan output/ target kinerja dan penambahan pagu kegiatan

11. Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum

- Pemberian Bantuan Hukum : mengalami penambahan pagu kegiatan

12. Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (RANHAM)

- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) : mengalami perubahan/ pergeseran antar belanja di dalam kegiatan

13. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

- Peningkatan dan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah : mengalami perubahan target kinerja dan pergeseran anggaran antar belanja dalam kegiatan

14. Program Pengembangan Data/ Informasi

- Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) : mengalami pergeseran anggaran antar belanja dalam kegiatan dan pengurangan pagu kegiatan

15. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

- Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah : mengalami penambahan pagu/ pergeseran anggaran antar kegiatan
- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan : mengalami pengurangan output dan pagu kegiatan sehubungan dengan

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah : mengalami penambahan output kegiatan dan pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan
- Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) : mengalami pergeseran anggaran belanja dalam kegiatan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan beserta pagu dana dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 secara rinci akan disajikan sebagaimana tabel I.I terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 disusun sebagai bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat tahun 2017.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini belum lengkap dan sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran demi perbaikan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini. Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini bermanfaat bagi semua pihak.

Perangkat Daerah : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH lembardari

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	a/b/c	1/2/3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19	
2.16.4.01.03.20.01	Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan	Silaturahmi Bupati Kotawaringin Barat dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di 6 Kecamatan	Silaturahmi Bupati Kotawaringin Barat dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di 6 Kecamatan	Pemerintah dan Masyarakat kotawaringin barat	Pemerintah dan Masyarakat kotawaringin barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	6 Kec	6 Kec	136,050,000	136,050,000	-	APBD	APBD	6 Kec	200,000,000		SETDA	
3.04	Urusan Perdagangan									50,000,000	50,000,000	-							
3.04.4.01.03.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan																		
3.04.4.01.03.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	Laporan pengawasan, penyaluran BBM dan LPG di 6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	6 buku	6 buku	50,000,000	50,000,000	-	APBD	APBD	6 Kec	32,967,000		SETDA	
3.06	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									985,000,000	1,185,000,000	200,000,000							
3.06.4.01.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan																		
3.06.4.01.03.15.11	Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Laporan monitoring dan inventarisasi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di 6 Kecamatan	Laporan monitoring dan inventarisasi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di 6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	3 buku	3 buku	30,000,000	30,000,000	-	APBD	APBD	6 Kec	50,000,000		SETDA	
3.06.4.01.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan																		
3.06.4.01.03.17.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik	Pemeliharaan Seluruhnya Lampu PJU di Kota Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan	Pemeliharaan Seluruhnya Lampu PJU di Kota Pangkalan Bun Kecamatan Arut Selatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	1 paket	1 paket	955,000,000	1,155,000,000	200,000,000	APBD	APBD	100%	1,500,000,000		SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana						
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19	
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat-menyurat	Jumlah Surat-menyurat	Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	840 pucuk surat	750 pucuk surat	6,525,000	5,300,000	(1,225,000)	APBD	APBD	840 Pucuk surat	6,050,000		SETDA	
		Jumlah Paket/pengiriman	Jumlah Paket/pengiriman					75 Kg paket	50 Kg paket						75 kg paket				
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran untuk jasa telepon, Air, Internet, Layanan TV Kabel dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran untuk jasa telepon, Air, Internet, Layanan TV Kabel dan Listrik	Setda kabupaten kotawaringin barat dan rujab	Setda kabupaten kotawaringin barat dan rujab	Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	Setda Kabupaten Kotawaringin Barat	12 Bulan	12 Bulan	4,078,500,000	4,172,630,000	94,130,000	APBD	APBD	12 bulan	4,475,000,000		SETDA	
		Langganan koran	Langganan koran					6 SKH	5 SKH						5 SKH				
4.01.4.01.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Dekorasi untuk pertemuan	Jumlah Dekorasi untuk pertemuan	Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	10 kali	14 kali	290,800,000	370,562,500	79,762,500	APBD	APBD	10 kali	290,800,000		SETDA	
		Jumlah Sewa kembang/bunga	Jumlah Sewa kembang/bunga					1 tahun	1 tahun						1 tahun				
		Jumlah Sewa meja dan taplak meja	Jumlah Sewa meja dan taplak meja					300 set	500 set						300 set				
		Jumlah Sewa tenda lengkung	Jumlah Sewa tenda lengkung					144 set	144 set						144 set				
		Jumlah Sewa panggung	Jumlah Sewa panggung					20 set	20 set						20 set				
		Jumlah Sewa peralatan sound svstem/musik	Jumlah Sewa peralatan sound svstem/musik					10 kali	10 kali						10 kali				
4.01.4.01.03.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah untuk rujukan berobat	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah untuk rujukan berobat	KDH, WKDH dan Pegawai Setda Kab.Ktw Barat	KDH, WKDH dan Pegawai Setda Kab.Ktw Barat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	12 orang	12 orang	57,000,000	162,000,000	105,000,000	APBD	APBD	12 orang	57,000,000		SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19
			Jumlah honorarium PPHP						100 OP									
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan Jasa kebersihan gedung, halaman, dan taman kantor Bupati	Jumlah bulan Jasa kebersihan gedung, halaman, dan taman kantor Bupati	Kantor Setda dan Rujab	Kantor Setda dan Rujab	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	4 Triwulan	4 Triwulan	516,477,800	516,477,800	-	APBD	APBD	4 triwulan	516,477,800		SETDA
		Jumlah bulan Jasa kebersihan di lingkungan Aula Antakusuma, Rujab Wakil Bupati dan Rujab Sekda	Jumlah bulan Jasa kebersihan di lingkungan Aula Antakusuma, Rujab Wakil Bupati dan Rujab Sekda					4 Triwulan	4 Triwulan									
		Jumlah Jasa Laundry	Jumlah Jasa Laundry					2050 Kg	1570 Kg dan 40 buah									
4.01.4.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	Peralatan Kerja pada kantor Setda	Peralatan Kerja pada kantor Setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	184 unit/ tahun	188 unit/ tahun	112,032,000	137,032,000	25,000,000	APBD	APBD	156 unit/ tahun	112,032,000		SETDA
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis KAntor Pada Kantor Setda	Alat Tulis KAntor Pada Kantor Setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	51 jenis ATK	49 jenis ATK	181,275,000	175,875,000	(5,400,000)	APBD	APBD	45 jenis atk	181,275,000		SETDA
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	Barang cetakan	Belanja cetakkan dan penggandaan di kantor setda	Belanja cetakkan dan penggandaan di kantor setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	17 Jenis	17 Jenis	180,600,000	180,600,000	-	APBD	APBD	20 jenis	180,600,000		SETDA
		Penggandaan	Penggandaan					300000 lembar	300000 lembar									
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik	komponen instalasi listrik pada kantor setda	komponen instalasi listrik pada kantor setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	29 jenis	30 jenis	38,970,500	63,970,500	25,000,000	APBD	APBD	32 jenis komponen	38,970,500		SETDA
4.01.4.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin finger print keperluan LPSE	Mesin finger print keperluan LPSE	Peralatan dan perlengkapan di kantor setda	Peralatan dan perlengkapan di kantor setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2 Unit	2 Unit	331,675,000	429,825,000	98,150,000	APBD	APBD	48 jenis	162,005,770		SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana						
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19	
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu Pemkab	Makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu Pemkab	Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu pada kantor setda	Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu pada kantor setda	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	1 Tahun	1 Tahun	1,250,880,500	1,570,238,500	319,358,000	APBD	APBD	12 bulan	1,000,000,000		SETDA	
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar kota	Jumlah perjalanan dinas ke luar kota	Perjalanan dinas ke luar daerah pada kantor setda	Perjalanan dinas ke luar daerah pada kantor setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1,060,604,500	1,461,772,300	401,167,800	APBD	APBD	1 Paket	900,000,000		SETDA	
4.01.4.01.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																		
4.01.4.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Penataan halaman, pagar dan papan nama sanggar pramuka kwarcab Kotawaringin Barat	Penataan halaman, pagar dan papan nama sanggar pramuka kwarcab Kotawaringin Barat	Gedung pada kantor Setda	Gedung kantor Pemkab Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	1 paket	1 paket	825,000,000	532,500,000	(292,500,000)	APBD	APBD				SETDA	
		Pembangunan Gedung Kantor Kas Desa BPR Marunting Sejahtera Riam Durian	Pembangunan Gedung Kantor Kas Desa BPR Marunting Sejahtera Riam Durian					1 paket	1 paket										
		Pembangunan tahap awal kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kotawaringin Barat	-					1 paket											
4.01.4.01.03.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	-	Jumlah Mobil jabatan Kepala Daerah	-	KDH/ WKDH	-	sekretariat daerah	-	1 unit	-	1,694,877,500	1,694,877,500	-	APBD				SETDA	
4.01.4.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda 2	Pengadaan kendaraan dinas roda 2	Kendaraan dinas/operasio nal pada kantor setda	Kendaraan dinas/operasio nal pada kantor setda	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	4 unit	5 unit	72,000,000	595,672,500	523,672,500	APBD	APBD				SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana						
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19	
4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Gedung kantor di kantor setda	Perlengkapan Gedung kantor di kantor setda	sekretariat daerah	sekretariat daerah	14 jenis	13 jenis	577,650,000	746,707,070	169,057,070	APBD	APBD	1 paket	491,001,074		SETDA	
4.01.4.01.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Rumah Jabatan Wakil KDH dan Setda	Rumah Jabatan Wakil KDH dan Setda	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	2 paket	2 paket	231,000,000	231,000,000	-	APBD	APBD	2 paket	105,000,000		SETDA	
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Perbaikan jaringan/ pipa air bersih	Jumlah Perbaikan jaringan/ pipa air bersih	Gedung kantor Bupati Kab. Kotawaringin Barat	Gedung kantor Bupati Kab. Kotawaringin Barat	sekretariat daerah	sekretariat daerah	1 Tahun	1 Tahun	365,000,000	399,452,000	34,452,000	APBD	APBD	1 tahun	365,000,000		SETDA	
		Jumlah Pemeliharaan instalasi listrik	Jumlah Pemeliharaan instalasi listrik					1 Tahun	1 Tahun										
		Jumlah pemeliharaan instalasi telepon	Jumlah pemeliharaan instalasi telepon					1 Tahun	1 Tahun										
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					3 Paket	3 Paket										
			Jumlah taman kantor yang dipelihara					-	1 taman										
4.01.4.01.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Kendaraan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kendaraan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	3 Unit	3 Unit	154,800,000	154,800,000	-	APBD	APBD	3 unit	154,800,000		SETDA	
4.01.4.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2, Genset, Speed Boat Setda	Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2, Genset, Speed Boat Setda	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	79 unit	69 unit	853,807,200	804,807,200	(49,000,000)	APBD	APBD	86 unit	853,807,200		SETDA	
4.01.4.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah AC dan Genset yang terpelihara	Jumlah AC dan Genset yang terpelihara	Kantor dan Rujab Kab. Kobar	Kantor dan Rujab Kab. Kobar	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	100 Unit	100 Unit	52,680,000	52,680,000	-	APBD	APBD	100 unit	52,680,000		SETDA	
4.01.4.01.03.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rehab berat Musholla eks Rumah Jabatan	Rehab berat Musholla eks Rumah Jabatan	sarana dan prasarana rumah Jabatan	sarana dan prasarana rumah Jabatan	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	-	APBD	APBD		-		SETDA	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19
5.01.4.01.03.15.06	Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE)	Laporan pengadaan barang/ jasa secara elektronik	Laporan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pemkab Kotawaringin Barat	Pemkab Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	12 Laporan	12 Laporan	155,950,000	139,950,000	(16,000,000)	APBD	APBD	12 laporan	250,000,000		SETDA
		Jumlah peserta Bimtek LPSE	Jumlah peserta yang mengikuti asistensi dan input Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Monev Online melalui LPSE					100 Orang Peserta	92 Orang Peserta						200 orang			
		Laporan Rencana Umum Pengadaan dari aplikasi SIRUP	Laporan Rencana Umum Pengadaan dari aplikasi SIRUP					2 Laporan	2 Laporan						2 laporan			
5.01.4.01.03.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan											-						
5.01.4.01.03.17.01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	BA kesepakatan tata batas administrasi	BA kesepakatan tata batas administrasi	Tersebar di 6 Kecamatan	Tersebar di 6 Kecamatan	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	10 Dokumen	10 Dokumen	80,875,000	163,575,000	82,700,000	APBD	APBD				SETDA
		Peta batas administrasi desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten	Peta batas administrasi desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten					10 Peta	10 Peta									
5.01.4.01.03.17.06	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Dokumen fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	-	Tersebar di 6 (enam) Kecamatan	-	Kab. Kotawaringin Barat	-	3 fasilitasi konflik	-	108,200,000	-	(108,200,000)	APBD	APBD				SETDA
5.01.4.01.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah																	
5.01.4.01.03.21.11	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Buku LPPD Tahun 2016	Buku LPPD Tahun 2016	Kab.Kotawarin gin Barat	Kab.Kotawarin gin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	10 buku	10 buku	51,625,000	51,625,000	-	APBD	APBD	10 buku	60,000,000		SETDA
		LPPD Tahun 2016	Soft file LPPD Tahun 2016					40 CD	40 CD						40 CD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggung-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19
5.01.4.01.03.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen Perencanaan Setda	Dokumen Perencanaan Setda	Seluruh Kegiatan pembangunan SKPD	Seluruh Kegiatan pembangunan SKPD	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	8 Dokumen	8 Dokumen	79,050,000	79,050,000	-	APBD	APBD		150,000,000		SETDA
		Laporan RFK dan Movev online kegiatan	Laporan RFK dan Movev online kegiatan					132 Eks	132 Eks						132 Eks			
		Laporan dan dokumentasi Movev kegiatan pembangunan Kab. Kotawaringin Barat	Laporan dan dokumentasi Movev kegiatan pembangunan Kab. Kotawaringin Barat					1 Dokumen	1 Dokumen						1 Dokumen			
		Rapat evaluasi program kerja pembangunan	Rapat evaluasi program kerja pembangunan					3 Kali	3 Kali						3 Kali			
		Data SDDKN	Data SDDKN					2 Eksemplar	2 Dokumen						2 Eksemplar			
		-	Website Administrasi Pembangunan					-	1 Website						1 Web			
5.01.4.01.03.21.15	Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	Laporan pengadaan barang/ jasa kabupaten melalui ULP	Laporan pengadaan barang/ jasa kabupaten melalui ULP	Pemkab. Kotawaringin Barat	Pemkab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	Kab. Kotawaringin Barat	96 Buku	96 Buku	841,800,000	832,050,000	(9,750,000)	APBD	APBD	96 Buku	800,000,000		SETDA
		Bimtek pengadaan barang/ jasa	Bimtek pengadaan barang/ jasa					100 Peserta	100 Peserta						100 Peserta			
		Bimtek pengadaan barang/ jasa desa	Bimtek pengadaan barang/ jasa desa					200 Peserta	200 Peserta						200 Peserta			
		Rapat koordinasi dan evaluasi pengadaan barang/ jasa	Rapat koordinasi dan evaluasi pengadaan barang/ jasa					4 Kali	4 Kali						4 Kali			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2017												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Keg	SKPD Penanggu ng-jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c		
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubah an	Sesudah perubah an	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12 - 11	14	15	16	17	18	19	
		Monitoring pengadaan barang/ jasa desa di Kecamatan	Monitoring pengadaan barang/ jasa desa di Kecamatan					6 Kec	6 Kec										
		Pengembanga n sistem informasi PBJ	Pengembanga n sistem informasi PBJ					1 Paket	1 Paket										
TOTAL										20,554,739,000	27,766,914,000	7,212,175,000							

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


MASRADIN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620401 198903 1 015